

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memasuki era otonomi daerah dengan diterapkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang berdasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi yaitu penyerahan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan undang-undang yang berlaku (Puspitasari, 2012: 1).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001 memikul suatu tugas yang harus memberikan inovasi dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri didalam mengelola dan

meningkatkan kinerja keuangan pemerintahnya yang akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat (Puspitasari, 2012: 1).

Setiap pemerintah pasti menginginkan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien. Terlebih lagi dalam situasi globalisasi seperti mana sekarang ini. Pemerintah harus mampu bersaing dengan pemerintah lain agar dapat bertahan. Pemerintah yang berdiri juga harus memberikan informasi dan laporan akan seluruh kegiatan operasi pemerintah yang dilakukannya dalam satu periode tertentu baik itu mengenai kinerja maupun keuangannya kepada pihak-pihak yang memerlukannya (Helmina,2010). Untuk dapat mengetahui gambaran tentang keadaan keuangan pemerintah, maka perlu diadakan analisis terhadap data keuangan dari pemerintah yang bersangkutan. Data keuangan yang dimaksud adalah data yang tercermin dalam laporan keuangan, yang memberikan gambaran tentang keuangan pemerintah, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta laporan-laporan keuangan lainnya.

Menurut Munawir (2007:1) dengan mengadakan analisa terhadap pos-pos neraca akan dapat diketahui atau akan diperoleh gambaran tentang posisi keuangannya, sedangkan analisa terhadap laporan laba ruginya akan memberikan gambaran tentang hasil atau perkembangan pada pemerintah yang bersangkutan. Setiap analisis keuangan bisa saja merumuskan rasio tertentu yang dianggap mencerminkan aspek tertentu (Suad Husnan, 2002:

69). Analisis rasio dapat memberikan penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dalam hal ini peneliti membatasi rasio yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah kabupaten Bone Bolango yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan. Analisis rasio digunakan karena lebih mudah membandingkan pemerintah dengan pemerintah lain, lebih mudah melihat tren pemerintah serta melakukan *forecaster* (peramalan) dimasa yang akan datang (Harahap, 2006: 343)

Penilaian kinerja keuangan pemerintah kabupaten Bone Bolango adalah salah satu upaya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangannya. Hal ini sangat penting untuk diketahui baik oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah agar pemerintah dapat tetap bertahan dalam persaingan dimasa sekarang dan mendatang. Suatu laporan keuangan tidak dapat memberikan informasi apapun sebelum menganalisis dan menginterpretasikan suatu laporan keuangan, barulah laporan keuangan itu memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan baik untuk pihak internal maupun eksternal pemerintah (Harahap, 2007).

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2013 BPK memberikan opini “**Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**”. BPK berpendapat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone

Bolango telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material kecuali untuk dampak hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2013, menurut pendapat BPK, telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango per 31 Desember 2013, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan salah satunya adalah pengeluaran kas pada rekening penampungan yang dikuasai oleh Kuasa BUD tidak dapat dijelaskan dengan dokumen/bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp23.923.678.534,00 sehingga transaksi pengeluaran tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya, berpotensi merugikan keuangan negara/daerah dan berpotensi mempengaruhi kewajaran penyajian Kas dan Utang PFK pada Neraca per 31 Desember 2013. Berdasarkan catatan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang telah dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dari 93 temuan terdapat 255 rekomendasi/saran dengan nilai kerugian daerah senilai Rp11,1 Milyar. Dari nilai tersebut telah dilakukan proses pemulihan kerugian negara/daerah sebesar Rp6,1 Milyar. Sedangkan sebesar Rp5,01 Milyar belum dilakukan pengembalian kerugian negara/daerah.

Kinerja keuangan suatu pemerintah diatas dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan potensi perkembangan yang baik bagi pemerintah. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada (Sundjaja, Ridwan dan Berlian, 2003). Pemerintah dapat dikatakan kondisi keuangannya dalam keadaan seimbang apabila pemerintah tersebut dapat membiayai aktifitas-aktifitas yang dijalankan dan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menghindari ketidak seimbangan keuangan pemerintah, maka pemerintah dapat mengatur keuangannya sedemikian rupa yaitu dengan mengadakan perencanaan dan pengawasan yang baik, guna menjaga kondisi dan posisi keuangan pemerintah.

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Bone Bolango diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah Bone Bolango. Dalam hal ini peran pemerintah diperlukan untuk merencanakan secara tepat bagaimana cara pemenuhan, penggunaan, dan pengawasan alokasi dana. Hal ini termasuk dalam kegiatan pembelanjaan pemerintah. Disamping itu adanya kerja sama yang baik antara atasan dan bawahan merupakan salah satu modal yang penting guna

memperoleh hasil yang diinginkan. Hal ini sangat bermanfaat guna membentuk suatu kinerja yang baik dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kondisi ini dapat diketahui dengan cara analisis kinerja pemerintah. Kinerja keuangan pemerintah dapat diketahui dengan mengadakan evaluasi laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango selama lima tahun terakhir (2009-2013) dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango selama lima tahun terakhir (2009 – 2013) dengan menggunakan indikator rasio keuangan pada APBD.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. **Bagi Pemerintah Daerah**

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

b. **Bagi Peneliti**

Salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang berharga dan memperdalam bidang yang diteliti.

c. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dibidang ilmu akuntansi pada umumnya dan ilmu akuntansi pemerintahan pada khususnya.